

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA BUKIT LAWANG
KECAMATAN BAHOROK**

M. Avizal Ramadhan¹⁾, Imsar²⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: m.avizal.ramadhan@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: imsar@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to find out and see how the role of society and local government participation in the development of the tourism sector in Bukit Lawang. This research uses qualitative method with research noted during field observation and interviews conducted by the author to informants. Sample in this study used a purposive sampling technique while attention to the availability of the society to become research informants. The result of this study indicate that the current development of the Bukit Lawang tourist attraction shows the local government is not optimal gave attention to the potential of Bukit Lawang. Including first, the road infrastructure to Bukit Lawang still very bad. Second, there is no availability of facilities. Third, the lack of implementation of education and training at the Langkat Regency tourism office for the development of human resources in the tourism sector. Forth, the lack of cooperation between the local government and the community to hold meetings both formally and informally with the aim of developing Bukit Lawang. Fifth, lack of regular guidance and supervision in the field by the Langkat district tourism.

Keywords : Participation, Society, Local Government, Tourism Development.

1. PENDAHULUAN

Salah satu pendorong utama perolehan devisa bagi banyak negara, termasuk Indonesia, adalah industri pariwisata. Hal yang berbeda ini didasarkan pada berbagai faktor yang menunjukkan bagaimana perkembangan dan pergerakan manusia menunjukkan tren positif yang terus tumbuh seiring dengan kemajuan ekonomi di berbagai negara dan kebutuhan mendasar manusia untuk belajar lebih banyak tentang daya pikat dan keindahan alam serta budaya masyarakat di berbagai bangsa.

Banyak negara yang saat ini mengubah paradigma pembangunannya sehingga lebih terfokus pada pertumbuhan sektor industri dan jasa, termasuk sektor pariwisata. Demikian pula, selama tiga puluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mendukung dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata dengan harapan pada akhirnya akan menggusur industri minyak dan gas yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan devisa negara.

Saat ini, pariwisata memainkan peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Sumatera Utara telah menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu tujuan pembangunan utamanya, dan pemerintah berupaya mempercepat kinerja industri tersebut. Bukit Lawang adalah bagian dari industri pariwisata Sumatera Utara.

Destinasi wisata yang populer di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat adalah Bukit Lawang. Selain itu, Bukit Lawang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser

(TNGL), kawasan konservasi orangutan. Dengan tujuan melindungi populasi orangutan yang semakin menurun akibat perburuan, perdagangan, dan penggundulan hutan, Pusat Rehabilitasi Orangutan Bukit Lawang didirikan pada tahun 1973.

Keindahan alam Bukit Lawang menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang untuk menikmati air sungai yang jernih dan indah. Namun, banjir bandang yang melanda Bukit Lawang pada tanggal 2 November 2003 menghancurkan resor wisata terdekat dan merusak sektor perjalanan dan pariwisata. Banjir merusak hampir 400 tempat tinggal, 3 masjid, 8 jembatan, 280 kios dan kios makanan, 35 hotel dan wisma, 239 orang—termasuk 5 wisatawan—dan sekitar 1.400 penduduk setempat kehilangan tempat tinggal. Beberapa pejabat kota dan organisasi non-pemerintah lingkungan menghubungkan tragedi itu dengan pembakaran yang melanggar hukum. Untuk meningkatkan perekonomian lokal, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah organisasi asing untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap, yang mengarah pada pembangunan dan pembukaan kembali fasilitas tersebut pada tahun 2004.

Banyak aspek kemajuan, termasuk peningkatan produktivitas, sarana produksi, mobilitas penduduk, ketersediaan barang dan jasa, dan perdagangan antar wilayah, dapat dibantu dengan infrastruktur yang memadai. Karena kekayaan dan sumber daya alamnya menjadi katalis utama kegiatan masyarakat di Bukit Lawang, baik masyarakat maupun pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut. Sebagai tuan rumah desa, penduduk setempat mengambil peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kota wisata selama siklus hidupnya. Sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, masyarakat memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pemerintah dan sektor komersial. (Wearing, 2001).

Dengan demikian, untuk membantu masyarakat menentukan jenis keterlibatan yang harus mereka tawarkan, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka, tempat keterlibatan masyarakat, serta arahan dan bimbingan. Untuk melayani kebutuhan lokal dengan lebih baik dan memajukan pengembangan atraksi wisata Bukit Lawang, masyarakat harus diberdayakan untuk menetapkan tujuan mereka sendiri dan memandu pengembangan pariwisata.

Penulis merumuskan masalah penelitian, “Bagaimana peran partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata di Bukit Lawang Kecamatan Bahorok?” berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas.

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengembangan wisata Bukit Lawang, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan obyek wisata Bukit Lawang dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan rumusan masalah.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Partisipan

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab Bersama

Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015 : 196).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri

b. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi Masyarakat Theresia et all (2015;196) Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama – sama bertanggung jawab terhadapnya.

Pengertian Partisipasi Masyarakat menurut, Theresia et all (2015;196) mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sikap masyarakat dalam hal ini, yakni memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

c. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan (Marsono, 2005). Kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Fauzi, 2019). Menurut Sarundajang (2002), kepala daerah merupakan orang yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut.

d. Pengembangan Sektor Wisata

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Dan pada pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggara kepariwisataan menunjang tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Strategi pengembangan pariwisata adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik, sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar daerah tujuan wisata.

A.Yoeti menyatakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu daerah tujuan wisata dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya, tujuan analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut.

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan daerah wisata, dengan kata lain pengembangan yang dilakukan tidak bisa hanya sembarangan saja harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik yaitu

1. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan. Dalam mengembangkan potensi pariwisata di suatu daerah harus bertumpu pada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang dapat menarik kedatangan wisatawan yaitu:
 - a. Natural resources (alami)
 - b. Atraksi wisata budaya
 - c. Atraksi buatan manusia
2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah. Segala macam fasilitas sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah wisata, seperti penginapan, rumah makan, transportasi, mushola, dll. Fasilitas-fasilitas di daerah wisata secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata
3. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cinderamata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya. Cinderamata merupakan salah satu kekuatan utama pariwisata yang selalu dicari wisatawan. Perbelanjaan wisatawan saat berwisata berbeda dengan perbelanjaan mereka saat berada di daerah asal. Wisatawan cenderung tidak memperhatikan harga melainkan lebih mementingkan dan keunikan produk.
4. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang vital seperti toilet, tempat parkir, tempat makan dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung, bukan itu saja tetapi bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang memadai untuk pengunjung.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas umum tersebut dapat menarik minat wisatawan begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Sarana dan prasarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga mereka dapat menikmati perjalanan wisatanya.

Yoeti menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, kemudian adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi kawasan wisata tersebut, terjadinya adminities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengembangan pariwisata terdapat komponen-komponen yang harus diiringi kinerja yang baik, oleh karena itu harus pihak-pihak yang saling bekerjasama yakni pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek serta pihak swasta sebagai investor, dan masyarakat itu sendiri sebagai ujung tombak dalam pengembangan pariwisata.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik kualitatif dalam hubungannya dengan analisis deskriptif. Karena perumusan gejala, data, atau pernyataan tentang evolusi sektor pariwisata, metode kualitatif digunakan. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan untuk mengumpulkan data, yang melibatkan melakukan wawancara, melakukan observasi, dan mendokumentasikan temuan. Pengumpulan data informasi/deskripsi diperlukan untuk proyek ini. Dua jenis data yang digunakan: data sekunder dikumpulkan dari sumber data yang sudah ada sebelumnya dan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dalam studi ini, fenomena sosial, perilaku, dan pemikiran individu dan kolektif dideskripsikan dan dianalisis.

Purposive sampling digunakan dalam proses pemilihan informan penelitian. Pemilihan informan atau sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dilakukan berdasarkan preferensi individu peneliti.(Martins et al, 2017). Teknik probabilitas, khususnya untuk memilih informan yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen atau anggota digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan informan. (Sugiyono, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk melestarikan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal suatu lokasi melalui pemberdayaan penduduk lokal. Tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap manfaat yang didistribusikan oleh usaha pariwisata. Panitia desa terpilih merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, karena mereka adalah pelaku utama di dalamnya. Efek positif dari pariwisata akan mengalir ke desa-desa terdekat. Realitas sumber daya alam, budaya, adat istiadat, identitas, dan artefak dari masa lalu semuanya termasuk dalam efek ini. (Sedarmayanti, 2018).

Dalam pariwisata berbasis masyarakat, salah satu daya tarik yang tidak dapat dipisahkan dari peran dan pemberdayaan masyarakat adalah pariwisata yang ditelaah dari berbagai sudut. mencapai keseimbangan antara faktor sosial dan ekonomi, dengan mempertimbangkan bagaimana perubahan nilai sosial dan komunikasi dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi.

Mengupayakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan dari kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan pemanfaatan lingkungan (Wray, 2010).

Pekan Bahorok merupakan ibukota kabupaten dari Kecamatan Bahorok yang merupakan salah satu kecamatan yang membentuk Kabupaten Langkat. Kecamatan Bahorok terletak 71 kilometer dari Kantor Camat Langkat. Wilayah Kecamatan Bahorok terletak pada ketinggian kurang lebih 105 meter di atas permukaan laut. Secara umum, Kabupaten Bahorok mengalami dua jenis iklim yang berbeda, Musim Kemarau dan Musim Hujan, seperti daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.

Bukit Lawang dan bagian lain dari kecamatan ini terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, terletak di atas lahan seluas 1345 hektar antara 3°550'–3°945' Lintang Utara dan 98°127'–98°995' Bujur Timur.

Kecamatan Bahorok memiliki 1 (satu) Kelurahan dan 19 Desa, Diantaranya : (1). Kelurahan Pekan Bahorok, (2). Desa Lau Damak, (3). Desa Timbang Lawan, (4). Desa Sampe Raya, (5). Desa Tanjung Lenggang, (6). Desa Suka Rakyat, (7). Desa Perkebunan Turangie, (8). Desa Perkebunan Bungara, (9). Desa Perkebunan Bukit Lawang, (10). Desa Empus, (11). Desa Simpang Pulo Rambung, (12). Desa Perkebunan Sei Musam, (13). Desa Batu Jongjong, (14). Desa Sematar, (15). Desa Perkebunan Pulau Rambung, (16). Desa Sei Musam Kendit, (17). Desa Timbang Jaya, (18). Desa Musam Pembangunan, dan (19). Desa Ujung Bandar.

Menurut hasil Data Kependudukan, sampai dengan Desember 2022, terdapat 43.500 jiwa yang mendiami Kecamatan Bahorok, terdiri dari 21.847 laki-laki dan 21.653 perempuan.

Menurut sumber pendapatan utama penduduk desa, masyarakat yang tinggal di Desa Perkebunan Bukit Lawang adalah para pekerja yang tidak menetap atau yang membuka usaha wisata Bukit Lawang atau yang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Industri pariwisata, masyarakat lokal, instansi pemerintah, wisatawan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya merupakan pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Cara hidup masyarakat di sekitar Bukit Lawang terbilang sangat mirip satu sama lain. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat bekerja di industri pariwisata secara berdampingan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) merupakan salah satu organisasi yang didirikan masyarakat setempat untuk mempromosikan pariwisata. Cara lain masyarakat terlibat dalam pelestarian lingkungan adalah melalui keramahan penduduk setempat dan mendidik pengunjung tentang tempat wisata. Kaum muda dan penyedia jasa pemandu wisata (Guides) merupakan mayoritas dari organisasi ini, dan mereka berjuang untuk mempromosikan kelestarian lingkungan dalam industri perjalanan dan pariwisata. Selanjutnya, masyarakat dan pemerintah setempat membuat kampanye sadar wisata, dan masyarakat menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan saluran air dengan menjaga kebersihannya. Terakhir, mereka berupaya mencegah banjir dengan melestarikan hutan. Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong kesadaran pariwisata melalui inisiatif ini, dan dengan menjaga sungai dan lingkungan yang bersih, mereka menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan.

Dengan adanya objek wisata Bukit Lawang, para pengangguran dapat bekerja di mana saja di pulau itu tanpa membahayakan orang lain. Misalnya, mereka bisa mengasah keterampilan sebagai pengrajin atau menjadi pemandu wisata karena pengunjung domestik dan asing datang silih berganti. Mereka yang pandai memasak bisa menjual makanannya di pusat-pusat pengunjung yang ramai, menjual jajanan atau jajanan, serta menyediakan jasa sewa ban untuk bermain di sungai agar bisa menghasilkan uang, antara lain. Kebanyakan orang yang mengunjungi Bukit Lawang membutuhkan pemandu untuk melihat orangutan atau ingin pergi arung jeram (disebut juga tubing) di sungai Bukit Lawang. Masyarakat terlibat dalam upaya ini

untuk memuaskan wisatawan sebagai pelanggan, karena masyarakat memperoleh keuntungan dari pelanggan yang puas (Imsar, 2018). Dari sini jelaslah bahwa potensi yang dimiliki oleh pemilik diantisipasi akan berdampak pada masyarakat dengan cara-cara sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, menghilangkan pengangguran, melindungi lingkungan, termasuk sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kebudayaan Kabupaten Langkat, khususnya Bukit Lawang, melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan, tenaga, serta keterampilan dan kecakapan. Bentuk partisipasi tersebut tertulis dalam penelitian yang dilakukan oleh (Meray et al., 2016)

(Hasanah et al., 2023)mendefinisikan infrastruktur pariwisata sebagai segala fasilitas yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan lancar dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Antara lain tersedianya jaringan listrik (PLN), jaringan komunikasi di Bukit Lawang yang dapat digunakan oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi, antara lain Telkomsel, XL, dan Indosat; dalam hal ini, jaringan itu penting; Anda dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan pariwisata di Bukit Lawang; ketersediaan pelayanan kesehatan, karena terdapat beberapa puskesmas dan klinik di kawasan wisata; pembentukan tim SAR yang ikut serta di kawasan bantaran sungai untuk berjaga-jaga dan menyelamatkan pengunjung jika tersapu arus.

Pengunjung dapat memanfaatkan berbagai fasilitas wisata yang ada di kawasan wisata Bukit Lawang, seperti:

1. Penginapan: Terdapat banyak hotel dan motel di kawasan DAS Bukit Lawang. Sebagian besar tempat ini mengikuti konsep Ecolodging, yang membutuhkan akomodasi yang menyatu dengan lingkungan alam. Misalnya, tempat tidur mungkin digantung dengan kelambu, di lantai hanya dengan tikar atau karpet, dan lain sebagainya. Biaya penginapan berkisar antara Rp. 100.000 menjadi Rp. 1.000.000,-.
2. Restoran: Ada banyak restoran dan kafe di kawasan Bukit Lawang di mana kita dapat menikmati berbagai hidangan gastronomi dan minuman dengan menu dan suasana yang bervariasi.
3. Perusahaan pengelola destinasi, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata, dan layanan operator tur (bus wisata, taksi, dan mobil sewaan).
4. Fasilitas pelengkap yang menyempurnakan fasilitas dasar dan membantu pengunjung merasa lebih betah di tempat yang mereka kunjungi. Contohnya termasuk ban, pelampung, perahu dan dayung, pakaian renang, area berkemah, dan fasilitas sholat. Di Bukit Lawang, terdapat lima masjid yang berjarak satu sama lain, beserta satu unit mushola. Bagi umat Kristiani juga terdapat gereja tradisional GBKP yang beroperasi secara tandem dengan bisnis lokal lainnya dan berlokasi strategis di dekat kawasan wisata. Dengan demikian, jasa studio foto yang ditawarkan di tempat-tempat wisata dapat dimanfaatkan oleh para pelancong yang ingin mengabadikan momen-momen spesial.
5. Fasilitas pendukung, termasuk toko oleh-oleh, adalah amenitas yang dibutuhkan wisatawan untuk melengkapi amenitas pelengkap dan dasar. Di sekitar lokasi wisata Bukit Lawang, sering terlihat penjual cinderamata yang menjajakan berbagai kerajinan tangan khas daerah setempat, dilanjutkan dengan department store (mini market) yang melayani masyarakat setempat. Beberapa vendor ini ingin memperluas pendapatan mereka dengan memulai bisnis yang menyediakan berbagai kebutuhan bagi wisatawan, seperti minimarket atau kedai minuman.

Perencanaan objek wisata Bukit Lawang diharapkan menghasilkan rencana pengembangan pariwisata yang komprehensif melalui proses partisipatif yang mempertimbangkan potensi

sumber daya alam, kepekaan ekosistem, ketersediaan ruang, memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan ekonomi lokal, dan keselamatan pengunjung dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan model destinasi wisata ramah lingkungan yang berwawasan ekologis.
2. Membangun paradigma untuk co-manajemen.
3. Menawarkan paket wisata alam kepada pengunjung domestik dan mancanegara.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan, menyebarluaskan informasi tentang keanekaragaman hayati masyarakat dan pengetahuan tradisional.
5. Menjamin kenyamanan dan keamanan tamu.
6. Meningkatkan manfaat yang diberikan pariwisata kepada masyarakat dan keterlibatannya.

Mayoritas yang langsung terlibat dalam pengembangan objek wisata Bukit Lawang—staf hotel, pemandu wisata, dan pedagang—sering berinteraksi langsung dengan wisatawan, dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMP dan SD. (SMP), bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali.

Pembahasan

Industri pariwisata dalam segala bentuknya, memiliki dampak yang luar biasa terhadap transformasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pembuat kebijakan pemerintah di sektor pariwisata perlu lebih memperhatikan hal ini dan mengevaluasi kembali cara pengembangan pariwisata agar dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. (Widyawati, 2018)

Dengan kata lain, upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata tumbuh dengan baik dan membuka jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan industri sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Namun perlu diingat bahwa unsur manusia dan keunikan identitas budaya daerah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Bagaimanapun, dalam industri pariwisata, unsur budaya dan kearifan lokal merupakan pengaruh yang berharga, dan wisatawan datang ke daerah tersebut karena ingin melestarikan karakter asli masyarakat. di dekat sini.

Pemerintah Kabupaten Langkat bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan rencana jangka panjang, khususnya di kawasan wisata Bukit Lawang. Dengan demikian, pemerintah juga terlibat dalam mengatur, mengawasi, dan merumuskan undang-undang. Selain fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia. Mengingat salah satu yang membantu pemerintah adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain pembinaan dan promosi yang tidak kalah pentingnya, tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang kepariwisataan meliputi pengawasan. Ini semua dituangkan dalam satu kebijakan untuk menghindari menghambat inisiatif swasta, karena pelaksanaan pariwisata menyentuh berbagai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan kehidupan masyarakat. Hal itu diperjelas dalam ketentuan umum UU Kepariwisata No 10 Tahun 2009.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kewenangan kepada daerah untuk secara mandiri mengembangkan, mengatur, dan mengelola wilayah darat dan air, sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kepemilikan sumber daya masing-masing daerah dan mencapai kesejahteraan lebih cepat. Pembangunan, termasuk pembangunan manusia dan fisik, adalah urusan pemerintah. Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata Bukit Lawang, khususnya dalam industri pariwisata daerah. Karena semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyadaran pariwisata, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat mampu menanamkan pemahaman yang lebih luas tentang hal tersebut di masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk secara aktif mengawal upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi daya tarik wisata Bukit Lawang.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, pemerintah terlibat dalam pengembangan industri pariwisata. Ini termasuk Pemerintah Kabupaten Bahorok, yang sangat memperhatikan infrastruktur, termasuk transportasi yang dapat diandalkan, air minum, dan listrik. Di Kabupaten Bahorok, pemerintah mengkhawatirkan akomodasi transportasi. Kabupaten Bahorok adalah objek wisata yang populer. Warga Distrik Bahorok akan mendapatkan pelatihan khusus dalam membuat kerajinan tangan. Dukungan pemerintah tersedia bagi masyarakat dalam bentuk alokasi tujuan wisata. properti disisihkan agar lingkungan dapat menjual pernik-pernik adat yang diproduksi oleh lingkungan. Perkembangan ekonomi Kabupaten Bahorok menjadi perhatian pemerintah. Pariwisata menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Bahorok. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan terjadi di kota ketika ada tujuan wisata. Kehadiran objek wisata juga akan menambah wawasan dan pengalaman warga Kabupaten Bahorok. Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat Bahorok akan bermanfaat bagi taraf hidup dan pendapatan warga kabupaten tersebut.

Dengan menjaga lingkungan wisata TNGL, ikut serta dalam semua inisiatif pemerintah untuk mempromosikan destinasi wisata Bukit Lawang, mengelola taman nasional, dan mengelola Kabupaten Bahorok, masyarakat setempat telah berkontribusi dalam pengembangan industri pariwisata di Bukit Lawang. Secara khusus, konsep ekowisata telah meningkatkan kesadaran akan nilai dan keuntungan konservasi sumber daya hayati. Jadi, kekhawatiran tentang isu-isu seperti kekeringan dan banjir akibat eksploitasi hutan yang berlebihan tidak berdasar. Dengan kata lain, jumlah kerusakan hutan dapat dikurangi dengan mengembangkan gagasan ekowisata dan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Karena masyarakat ingin diberdayakan dalam proses pembangunan agar benar-benar merasakan manfaat pembangunan desa, maka penggerak utama masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata adalah komponen partisipasi masyarakat. perjalanan (Darmayanti et al., 2021).

Oleh karena itu, partisipasi diberikan prioritas dalam pertumbuhan industri pariwisata Bukit Lawang di Kabupaten Bahorok. Keterlibatan masyarakat lokal akan memberikan perspektif yang menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk sektor pariwisata. Perspektif masyarakat lokal akan selaras dengan kebijakan yang dikembangkan pemerintah, mendorong keharmonisan dalam pertumbuhan pariwisata. (Thetsane, 2019) dan keberhasilan ditunjukkan oleh produktivitas yang lebih tinggi, yang juga terlihat dalam penyelesaian tugas yang diberikan. (Andi Mulyan, 2022)

5. KESIMPULAN

Dalam rangka memajukan Kecamatan Bahorok, partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah di bidang pariwisata sangatlah penting. Partisipasi pemerintah dan masyarakat termasuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan melestarikan lingkungan.

Pertumbuhan pariwisata memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama ekonominya. Akibatnya, masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari anggotanya yang terlibat dalam kegiatan seperti perdagangan barang dan jasa berkualitas tinggi untuk ditukar di dalam kota wisata.

Mengacu pada besarnya potensi Kabupaten Bahorok yang menawarkan peluang dan prospek pertumbuhan industri pariwisata di wilayah ini, maka harus ekstra hati-hati untuk dapat memanfaatkannya secara positif guna memaksimalkan potensi daya tarik wisata dengan harapan menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya bersama untuk secara bertahap dan berkelanjutan memperkenalkan dan mengiklankan semua kemungkinan atraksi wisata di wilayah ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan terlaksananya penelitian ini, termasuk warga Kecamatan Bahorok, Pemerintah Daerah Kabupaten Bahorok, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mulyan, L. M. Y. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kalias Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8(3), 2266–2286.
- Cernea, M. M. (1998). *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan Terjemahan Basilius Bengo Teku*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Darmayanti, P. W., Fila Hidayana, F., A.A. Sagung Ayu Srikandi Putri, & I Wayan Wijayasa. (2021). Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Utama dalam Pengembangan Desa Wisata Kaba-Kaba. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.28>
- DPR RI. (2007). *DPR RI, Undang Undang RI NO 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025*.
- DPR RI. (2009). *DPR RI, Undang-Undang Kepariwisata RI No 10 tahun 2009 Presiden RI, 1996*.
- Echols & Shadily. (2005). *Kamus Inggris Indonesia,- edisi XXVI*. Gramedia.
- Fandeli, C. dan M. (2000). *Pengusaha Ekowisata*. Pustaka Pelajar Offset UGM Fak, Kehutanan.
- Hafni Roswita dan Lily Suhafni Lubis. (2016). DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI DI DESA SUKA MERIAH KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Hasanah, N., Anggraini, T., Daim Harahap, R., & Islam Negeri Sumatera Utara, U. (2023). Pengaruh Gaya Hidup, Media Sosial dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Konsumsi di Masa Pandemi Menurut Ekonomi Islam: Studi pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. In *MES Management Journal* (Vol. 2, Issue 1).
- Imsar. (2018). *ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA UCOK DURIAN MEDAN*.
- Jhingan, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah*. PT. Rajawali Pers.
- Martins et al. (2017). *Association for Contextual Behaviour Science*.

- Meray, J. G., Tilaar, I. S., Takumansang, E. D., St, M. 3, Ratulangi, S., 2&3, M., Pengajar, S., Arsitektur, J., & Abstrak, M. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI MAHEMBANG KECAMATAN KAKAS. *Jurnal Unsrat*, 3, No.3.
- Murdiyanto, E. (2011). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KARANGGENENG, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN. *JURNAL SEPA*, 7 No. 2(1829–9946), 91–101.
- Peraturan Ditjen PKHA. (2016). *Kawasan taman wisata alam*.
- Peraturan Pemerintah RI. (1996). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.
- Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph. D. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Edisi 3). Penerbit Erlangga.
- Santoso, F. (2007). *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*. Padang : Majalah Online.
- Sedarmayanti, S. G. S. , A. L. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. PT.Refika Aditama.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, No.1, 1–140.
- Sugiyono. (2016). *Model Penelitian Kualitatif*. CV. Alfa Beta.
- Suhaeb, M. I. (2018). *Analisis pengaruh pengembangan pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada destinasi pariwisata di Kota Makassar : kepulauan Spermonde*. UNHAS.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Modern*. PT Raja Graamedia Perkasa.
- Thetsane, R. M. (2019). Local Community Participation in Tourism Development: The Case of Katse Villages in Lesotho. *ATHENS JOURNAL OF TOURISM*, 6(2), 123–140. <https://doi.org/10.30958/ajt.6-2-4>
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Pradnya Paramita.
- Wearing, S. (2001). *Volunteer Tourism : Experience That Make a Different*. CABI.
- Widyawati, C. (2018). Peranan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Heritage di Trowulan. *Jurnal Pariwisata*, 5, 83–94.
- Wray, Meredith. (2010). *Sustainable regional tourism destinations, best pratice for management, development, and marketing*. CRC for Sustainable Tourism.
- Yoeti A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT. Pradnya Paramita.